



FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI BELANJA DAERAH SERTA KEMUNGKINAN TERJADINYA *FLYPAPER EFFECT* DI KERESIDENAN MADIUN

Candra Wisnu Pradana¹⁾, M. Agus Sudrajat²⁾, Nik Amah³⁾

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas PGRI Madiun

Email: candrawisnupradana@yahoo.co.id¹⁾, agus.sudrajat84@gmail.com²⁾,
sigmaku87@gmail.com³⁾

Abstract

This study aims to: (1) determine the effect of Regional Original Revenue (PAD) on Regional Expenditure in Regencies / Cities in the Madiun Residency area in 2014-2018; (2) determine the effect of the General Allocation Fund (DAU) on Regional Expenditure in Regencies / Cities in the region Madiun Residency in 2014-2018; (3) knowing the Regional Original Revenue (PAD) and General Allocation Fund (DAU) of Regional Expenditures in the Madiun Residency area in 2014-2018; and (4) knowing whether there is a flypaper Effect on Regional Expenditures. The population in this study were all regencies / cities in the Madiun Residency area in 2014-2018, amounting to 8 districts / cities. Data collection techniques using the documentation method. Prerequisite test data analysis using multicollinearity test, heterokedasticity test, and autocorrelation test. Hypothesis testing uses simple linear regression and multiple linear regression analysis

Keywords: *Regional Original Revenue (PAD), General Allocation Fund (DAU), and Regional Expenditure*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota pada wilayah Keresidenan Madiun tahun 2014-2018, 2) menganalisis pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota pada wilayah Keresidenan Madiun tahun 2014-2018, 3) menganalisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Daerah pada di wilayah Keresidenan Madiun tahun 2014-2018, 4) menganalisis apakah terjadi flypaper Effect pada Belanja Daerah. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Kabupaten/Kota di wilayah Keresidenan Madiun tahun 2014-2018 yang berjumlah 8 kabupaten/kota. Teknik pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi. Uji prasyarat analisis data menggunakan uji multikolonieritas, uji heterokedastisitas, dan uji autokorelasi. Uji hipotesis menggunakan regresi linier sederhana dan analisis regresi linier berganda

Kata kunci: *Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Belanja Daerah (BD)*

PENDAHULUAN

Melalui Undang-Undang No 22 tahun 1999 Indonesia mulai mengalami suatu fase baru dalam sistem kenegaraan yang disebut dengan otonomi daerah. Kewenangan untuk mengatur wilayah sendiri tidak sekedar mengenai bidang administratif. Pengaturan mengenai perimbangan keuangan ini diatur dalam Undang-Undang No 25 tahun 1999. Pada prakteknya Undang-Undang ini berlaku mulai 1 Januari 2001.

Penggunaan semua dana perimbangan diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Daerah tanpa intervensi dari Pemerintah Pusat. Pada praktiknya, transfer dari Pemerintah



Pusat seringkali dijadikan sumber dana utama oleh Pemerintah Daerah untuk membiayai operasi utama sehari-hari.

Otonomi daerah ini berpotensi menyebabkan *flypaper effect*, transfer dari pusat seakan-akan dijadikan yang utama untuk membiayai belanja yang masuk dalam perhitungan Belanja Daerah (BD). *Flypaper effect* ini menunjuk pada suatu kondisi yang terjadi saat pemerintah daerah merespon (belanja) lebih banyak atau boros dengan menggunakan dana transfer (*grants*) yang diprosikan dengan Dana Alokasi Umum (DAU) daripada dengan kemampuan sendiri, diprosikan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Wujud dari perimbangan keuangan antar pusat dan daerah diwujudkan melalui dana perimbangan yang bersumber dari APBN yang memang dialokasikan khusus kepada daerah untuk menyelenggarakan tugas daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang dibiayai atas beban APBD dimana Dana Perimbangan terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan dana bagi hasil pajak / bagi hasil bukan pajak dari sumber daya alam. Ketiga jenis pendapatan tersebut dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendanaan utama yang digunakan bagi Pemerintah Daerah dalam rangka menyelenggarakan pemerintahannya sendiri. Dana bagi hasil berperan sebagai penyeimbang fiskal antar pusat dan daerah dari pajak yang dibagi. DAU berperan sebagai pemerata fiskal antar daerah (*fiscal equilization*) di Indonesia dan DAK berperan sebagai dana yang didasarkan pada kebijakan yang bersifat darurat.

Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Madiun menurut Ketua DPRD Kota Madiun Istono selalu melebihi target setiap tahunnya. PAD 2017 mencapai Rp 230 miliar. Padahal, targetnya hanya Rp 192 miliar. Begitu juga dengan tahun 2018, PAD ditarget Rp 206 miliar 2018 ini. Sedang, capaian per pertengahan November ini sudah Rp 194 miliar. Istono optimis PAD bakal melampaui target seperti tahun sebelumnya. Pendapatan tahun ini juga terdongkrak dari DID. Bahkan, DID Kota Madiun memecahkan rekor tahun ini. Pendapatan DID mencapai Rp 55 miliar. Terbesar yang pernah dicapai diangka Rp 32 miliar.

Menurut Syaukani, dkk (2009:145-150), ada beberapa karakteristik yang menonjol dari prinsip penyelenggaraan pemerintahan UU Nomor 5 Tahun 1974, yaitu: Pertama, Wilayah negara dibagi kedalam Daerah besar dan kecil yang bersifat otonom atau administratif saja. Kedua, pemerintahan daerah diselenggarakan secara bertingkat, yaitu Daerah Tingkat I, Daerah tingkat II sebagai Daerah *Otonom*, dan kemudian wilayah *administrative* berupa provinsi, *Otonomi* Daerah dan Desentralisasi dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia kabupaten/kotamadya, dan kecamatan. Ketiga, DPRD Tingkat I maupun Tingkat II dan kotamadya merupakan bagian dari Pemerintahan Daerah. Keempat, peranan Menteri Dalam Negeri dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dikatakan bersifat sangat *eksesif* atau berlebihan yang diwujudkan dengan melakukan pembinaan langsung terhadap daerah. Kelima, UU ini memberikan tempat yang sangat terhormat dan sangat kuat kepada Kepala Wilayah ketimbang kepada Kepala Daerah. Keenam, Keuangan Daerah sebagaimana umumnya dengan undang-undang terdahulu, diatur secara umum saja. Daerah juga mendapat bantuan dari Pemerintahan Pusat berupa “Pemberian Pemerintah”, sebuah istilah yang menandakan kemurahan hati Pemerintahan di Jakarta.



Dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, maka daerah diberikan otonomi atau kewenangan kepada daerah untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Adanya desentralisasi keuangan merupakan konsekuensi dari adanya kewenangan untuk mengelola keuangan secara mandiri. Apabila Pemerintah Daerah melaksanakan fungsinya secara efektif dan mendapat kebebasan dalam pengambilan keputusan pengeluaran disektor publik maka mereka harus mendapat dukungan sumber keuangan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan lain-lain dari pendapatan yang sah (Rahmawati, 2010).

Dana transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah selain DAU adalah Dana Alokasi Khusus (DAK) yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional (Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004). Penggunaannya diatur oleh pemerintah pusat, dan hanya digunakan untuk kegiatan pendidikan, kesehatan, keluarga berencana, infrastrukturjalan dan jembatan, infrastruktur irigasi, infrastruktur air minum dan sanitasi, prasaran pemerintah daerah, lingkungan hidup, kehutanan, sarana prasaran pedesaan, perdagangan, pertanian serta perikanan dan kelautan yang semuanya itu termasuk dalam Belanja Daerah dan pemerintah daerah diwajibkan untuk mengalokasikan dana pendamping sebesar 10% dari nilai DAK yang diterimanya untuk kegiatan fisik, oleh sebab itu dalam penelitian DAK tidak digunakan sebagai variabel independen yang mempengaruhi Belanja Daerah. Berdasarkan permasalahan dari berbagai paragraf sebelumnya.

Peneliti ingin mengetahui apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap belanja Daerah wilayah Keresidenan Madiun pada periode tahun 2014-2018 Berkaitan dengan permasalahan ini, maka judul skripsi ini yaitu: **“Flypaper effect Pada Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Belanja Daerah Serta Kemungkinan Terjadinya Flypaper effect Di Keresidenan Madiun”**.

KAJIAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESA

Belanja Daerah (BD)

Pengeluaran pemerintah daerah berperan untuk mempertemukan permintaan masyarakat dengan penyediaan sarana dan prasarana yang tidak dipenuhi oleh swasta. Sedangkan pengeluaran pemerintah itu sendiri tidak begitu saja dilaksanakan oleh suatu pemerintah daerah, tapi harus direncanakan terlebih dahulu.

Pada ketentuan UU No.33 Tahun 2004 telah diatur beberapa aspek yang berkaitan dengan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Salah satu yang diatur dalam ketentuan ini yaitu permasalahan belanja daerah. Menurut UU No.33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan daerah antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, belanja daerah dimaksudkan sebagai semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Rinciannya bisa dibagi dalam dua bentuk yaitu berdasar sifat dan berdasar fungsinya. Berdasar sifat ekonominya belanja daerah terdiri atas belanja pegawai dan belanja barang, subsidi, hibah dan bantuan sosial. Sedangkan berdasar fungsinya belanja daerah terdiri dari belanja untuk



pembangunan perumahan dan fasilitas umum, peningkatan kesehatan, pariwisata, budaya, agama, pendidikan serta perlindungan sosial.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 18 menyebutkan Pendapatan Asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Soekarwo (2003) dalam Afrizal Tahar (2011) pada dasarnya upaya pemerintah daerah dalam mengoptimalkan PAD dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu:

- a. *Intensifikasi*, yaitu suatu upaya mengoptimalkan PAD dengan cara meningkatkan dari yang sudah ada (diintensifkan).
- b. *Ekstensifikasi*, yaitu mengoptimalkan PAD dengan cara mengembangkan subjek dan objek pajak.
- c. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat, yaitu merupakan unsur yang penting mengingat bahwa paradigma yang berkembang dalam masyarakat saat ini adalah pembayaran pajak dan restribusi ini sudah merupakan hak dan kewajiban masyarakat terhadap Negara, untuk itu perlu dikaji kembali pengertian wujud layanan masyarakat yang bagaimana yang dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat.

Dari pendapat diatas dapat penulis simpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah dari hasil sumber daya yang dimiliki oleh daerah tersebut dan harus dioptimalkan penggunaannya di daerah tersebut

Pengertian Dana Alokasi Umum (DAU)

Dalam menjalankan tugasnya sebagai daerah otonom, pemerintah daerah sangat bergantung kepada dana perimbangan dari pemerintah pusat diantaranya berupa bagi hasil pajak, bagi hasil SDA, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Dana Alokasi Umum (DAU) yang merupakan sumbangsih utama dalam pembiayaan APBD sebagian besar terserap untuk belanja pegawai sehingga belanja untuk proyek-proyek pembangunan menjadi sangat minim. Kendalanya yang dihadapi pemerintah daerah dalam menjalankan otonomi daerah adalah rendahnya pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah.

Menurut Bambang Kesit Prakosa (2004) “Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pembelanjaan”.

Menurut PP Nomor 55 Tahun 2005 “Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan *desentralisasi*”.

Flypaper effect

Tujuan utama pemerintah pusat memberikan transfer keuangan adalah membantu meningkatkan permintaan *agregate* pemerintah lokal melalui peningkatan pengeluarannya. Kebijakan transfer keuangan ini banyak dialamatkan bagi daerah-daerah yang secara



ekonomi masih miskin sehingga transfer keuangan dapat dianggap sebagai subsidi bagi masyarakat local.

Roemer dan Silvestre (2000) dalam Suyanto (2010) berpendapat bahwa "Flypaper effect" secara umum dapat dipahami sebagai ketidak sepadanan pengaruh pengeluaran publik dari bantuan pemerintah federal dan peningkatan pendapatan dengan jumlah yang sama".

Widodo (2007:35) dalam Pramuka, B.A. (2010) memberikan penjelasan bahwa "Dalam sebuah proses penyusunan anggaran ada sebuah teori yang dikenal dengan istilah incrementalism. Sistem penganggaran Incrementalism adalah sistem penganggaran yang hanya menambah atau mengurangi jumlah rupiah pada item-item anggaran yang sudah ada sebelumnya dengan menggunakan data tahun sebelumnya sebagai dasar untuk menyesuaikan besarnya penambahan atau pengurangan".

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah (BD)

Dengan tersedianya infrastruktur dan sarana prasarana yang memadai bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Ditambah dengan masyarakatnya yang bisa memanfaatkan fasilitas tersebut sebaik mungkin akan berpengaruh pada tingkat produktivitasnya yang semakin meningkat, dengan begitu bisa menarik investor untuk membuka usaha di daerah tersebut.

Penelitian, Tara Kartika dan Ign Agus Wantara (2012), Elita Herlina (2013), Afrizal Tahar dan Maulida Zakhiya (2011) Nauval Hafiluddin (2013) menunjukkan adanya pengaruh antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap peningkatan Belanja Daerah (BD). Berdasarkan uraian diatas hipotesis yang bias dikembangkan adalah sebagai berikut :

H1: Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Belanja Daerah (BD)

Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Daerah (BD)

Sejak berlakunya otonomi daerah, daerah diharapkan mampu mengelola sumber daya yang dimiliki sehingga tidak hanya mengandalkan DAU. Dibeberapa daerah peran DAU sangat signifikan karena kebijakan belanja daerah lebih di dominasi oleh jumlah DAU dari pada PAD (Sidik, 2002:62).

Setiap transfer DAU yang diterima daerah akan ditunjukkan untuk belanja pemerintah daerah, maka tidak jarang apabila pemerintah daerah menetapkan rencana daerah secara pesimis dan rencana belanja cenderung optimis supaya transfer DAU yang diterima daerah lebih besar. Hal ini dapat diartikan bahwa semakin tinggi dana alokasi umum yang diterima daerah maka akan semakin tinggi pula anggaran yang akan dibelanjakan.

Penelitian, Tara Kartika dan Ign. Agus Wantara (2012), Elita Herlina (2013), Afrizal Tahar dan Maulida Zakhiya (2011) Nauval Hafiluddin (2013) menunjukkan adanya pengaruh antara Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap peningkatan Belanja Daerah (BD). Berdasarkan uraian diatas hipotesis yang bias dikembangkan adalah sebagai berikut :

H2: Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Belanja Daerah (BD)



Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Dana Alokasi Umum (DAU) Secara Bersama-Sama Terhadap Belanja Daerah (BD)

Pada dasarnya, ada dua sumber penerimaan daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Setiap daerah memiliki jumlah penerimaan yang berbeda serta memiliki perbedaan dalam prioritas pembangunannya. Untuk mendukung program pembangunan serta kinerja daerah, maka daerah dituntut untuk menyediakan fasilitas serta infrastruktur yang memadai. Pengeluaran tersebut berkaitan dengan Belanja Daerah seperti pengadaan lahan, gedung, peralatan dan pelayanan kepada masyarakat. Belanja ini tentunya akan disesuaikan dengan besarnya penerimaan dari daerah yang bersangkutan. Hal ini mengindikasikan bahwa perilaku Belanja Daerah mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Alokasi Umum (DAU) yang memberikan kontribusi sesuai dengan aspek masing-masing yang dibutuhkan oleh daerah untuk kepentingan masyarakat.

Penelitian, Elita Herlina (2013), Afrizal Tahar dan Maulida Zakhiya (2011) menunjukkan adanya pengaruh antara Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap peningkatan Belanja Daerah (BD). Berdasarkan uraian diatas hipotesis yang bias dikembangkan adalah sebagai berikut :

H₃: Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Belanja Daerah (BD)

Mengetahui Terjadinya Flypaper Effect Terhadap Belanja Daerah (BD)

Untuk menentukan terjadi atau tidaknya flypaper effect maka peneliti menggunakan pendekatan flypaper effect yakni menggunakan perbandingan antara koefisien PAD dan koefisien DAU. Jika koefisien DAU > Koefisien PAD maka terjadi flypaper effect, atau bisa juga dapat difungsikan jika $b_1 > b_2$, berarti > 1 maka terjadi flypaper effect. Untuk mengetahui ada atau tidaknya terjadi flypaper effect, maka DAU tentunya harus memiliki pengaruh yang lebih kuat dari pada PAD.

Dalam penelitiannya, Herlina Elita (2013), dan Hafiluddin Nauval (2013) menunjukkan terjadinya flypaper effect terhadap Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD). Berdasarkan uraian diatas hipotesis yang bias dikembangkan adalah sebagai berikut :

H₄: terjadinya flypaper effect terhadap Belanja Daerah (BD)

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel penelitian

Populasi

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas subyek atau objek yang memiliki karakter dan kualitas tertentu yang ditetapkan oleh seorang peneliti untuk dipelajari yang kemudian ditarik sebuah kesimpulan (Sugiyono, 2008) Populasi dalam penelitian ini adalah pemerintah Kabupaten/Kota wilayah Jawa Timur yang berjumlah 38 Kabupaten dan Kota.

Sampel

Sampel memiliki arti suatu bagian dari keseluruhan serta karakteristik yang dimiliki oleh populasi. *Cluster Sampling* (Area Sampling) teknik ini digunakan bilamana populasi



tidak terdiri dari individu-individu, melainkan terdiri dari kelompok-kelompok individu atau cluster. Teknik sampling daerah digunakan untuk menentukan sampel bila objek yang akan diteliti atau sumber data sangat luas. Pada penelitian ini sampel yang digunakan adalah pemerintah Kabupaten Dan Kota di wilayah Keresidenan Madiun.

Definisi dan Pengukuran Variabel

Variabel Dependen

Dokumen anggaran daerah disebut APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) baik untuk provinsi maupun kabupaten/kota. Seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah baik dalam bentuk uang, barang, dan jasa pada tahun anggaran harus dianggarkan dalam APBD (Aprizay, 2014).

Variabel Independen

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan dengan sumbernya dari daerah tersebut. Pemungutannya didasari oleh peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan cakupannya yaitu terdiri dari Hasil Pajak Daerah (HPD), Retribusi Daerah (RD), Pendapatan dari Laba Perusahaan Daerah (PLPD) dan Lain-lain Pendapatan yang Sah (LPS), perhitungannya rumusnya yaitu:

$$PAD=HPD+RD+PLPD+LPS$$

Keterangan :

PAD= Pendapatan Asli Daerah

HPD= Hasil Pajak Daerah

RD= Retribusi Daerah

PLPD= Pendapatan dari Laba Perusahaan Daerah

LPS= Lain-lain Pendapatan yang Sah

Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan salah satu transfer berbentuk dana yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dan bersumber dari pendapatan APBN. Pengalokasian DAU bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan tingkat daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Umum (DAU) untuk provinsi maupun kabupaten/kota dihitung dengan acuan sebagai berikut:

$$DAU= \text{Celah Fiskal} + \text{Alokasi Dasar}$$

Keterangan :

Celah fiskal = kebutuhan fiskal -kapasitas fiskal

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran terhadap suatu data pada variabel-variabel yang digunakan. Pengukuran yang

digunakan dalam analisis statistik diskriptif dalam penelitian ini menggunakan minimum, maksimum, rata-rata (mean), standar deviasi dan range. Gambaran mengenai data tersebut dapat dilihat dalam tabel statistik sebagai berikut ini:

Tabel 1. Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PAD (X1)	30	89569	236841	156143,73	35922,455
DAU (X2)	30	502392	1062582	846316,83	18168,024
APBD (Y)	30	989473	2265259	1673826,83	355942,067
Valid N (listwise)	30				

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa variabel independen PAD memiliki nilai minimum sebesar 89469 diperoleh dari Kabupaten Pacitan pada tahun 2015 dan nilai maksimum sebesar 236841 diperoleh dari Kota Ponorogo pada tahun 2018. Jumlah populasi yang diteliti berjumlah 30. Nilai mean sebesar 156143,73 dan standar deviasi sebesar 35922,355.

Dana Alokasi Umum (DAU)

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa variabel independen DAU memiliki populasi sebesar 30. Minimum sebesar 502392 diperoleh dari Kota Madiun pada tahun 2018, dan nilai maksimum sebesar 1062582 diperoleh dari Kabupaten Ponorogo pada tahun 2017. Nilai mean sebesar 846316,43 dan standar deviasi sebesar 18168,024.

Belanja Daerah

Berdasarkan tabel di atas variabel independen belanja modal memiliki jumlah populasi sebanyak 30. Memiliki nilai minimum sebesar 989473 diperoleh dari Kota Madiun pada tahun 2015 dan maksimum sebesar 2255259 diperoleh dari Kabupaten Ponorogo pada tahun 2018. Nilai mean sebesar 1673826,83 dan nilai standar deviasi sebesar 355942,067.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas merupakan salah satu bagian dari uji persyaratan analisis data atau uji asumsi klasik, artinya sebelum kita melakukan analisis statistik untuk uji hipotesis dalam hal ini adalah analisis regresi, maka data penelitian tersebut harus di uji kenormalan distribusinya.

Tabel 2. Tabel Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardize Residual
N		30
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0,0000000
	Std. Deviation	8,11075081E4
Most Extreme Differences	Absolute	0,121
	Positive	0,121
	Negative	-0,102
Kolmogorov-Smirnov Z		0,661
Asymp. Sig. (2-tailed)		0,775

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Berdasarkan *output* SPSS tersebut, diketahui bahwa nilai signifikansi *Asymp.Sig (2-tailed)* sebesar 0,775 lebih besar dari 0,05 maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji *kolmogorov-smirnov* dapat disimpulkan bahwa data di atas berdistribusi normal.

Uji Multikolonieritas

Multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam persamaan regresi ditemukan adanya variabel bebas (independen). Jika tidak terjadi korelasi antar variabel bebas berarti model regresi tersebut baik. Pengujian ini dengan bantuan aplikasi statistik pada *Collinearity Diagnostics* dengan hasil: jika nilai tolerance variabel independen $\geq 0,10$ dan nilai $VIF \leq 10$ menunjukkan bahwa tidak adanya variabel independen dalam model regresi. Berikut hasil uji multikolonieritas dengan melihat nilai tolerance dan lawannya VIF:

Tabel 3. Uji Multikolonieritas

Model		Collinearity Statistics		Keterangan
		Tolerance	VIF	
1	PAD	0,745	1,343	Tidak terjadi Multikolonieritas
	DAU	0,745	1,343	Tidak terjadi Multikolonieritas

a. Dependent Variable: BD

Tabel di atas menunjukkan bahwa hasil perhitungan nilai tolerance menunjukkan tidak ada variabel yang memiliki tolerance kurang dari 0,10, hal tersebut menunjukkan bahwa tidak ada Multikolonieritas antar variabel independen. Sedangkan hasil perhitungan nilai Variance Inflation Factor (VIF) tidak ada satu variabel independen yang memiliki nilai VIF lebih dari 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolonieritas antar variabel independen dalam regresi.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dilakukan untuk mengidentifikasi apakah dalam model regresi linier ada korelasi antar kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Untuk mengetahui ada tidaknya autokorelasi dapat dilihat dengan nilai uji Durbin-Watson (D-W)

Tabel 4. Uji Autokorelasi

dU	Durbin Watson	Kesimpulan
1,2837	1,794	Tidak terjadi autokorelasi

Dengan nilai tabel pada tingkat signifikansi 5%, jumlah data 30 (n) dan jumlah variabel independen $2(k=2)$, maka dari tabel DurbinWatson akan didapatkan nilai batas atas (dU) 1,2837, dan batas bawah (dL) 1,5736. DurbinWatson (DW) terletak diantara dL dan $4-dU$. Nilai dU sebesar 1,2837, $4-1,2837 = 2,7163$ dan hasilnya diperoleh $1,2837 < 1,794 < 2,7163$ Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi pada model regresi ini.

Persamaan Regresi

Pengujian Regresi dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier sederhana dan analisis regresi linier berganda. Teknik analisis regresi linier sederhana digunakan untuk menguji hipotesis pertama dan kedua. Hal ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Sedangkan teknik analisis regresi berganda digunakan untuk menguji hipotesis ketiga. Teknik analisis tersebut dilakukandengan menggunakan bantuan program statistik.

Pengujian Regresi Sederhana

Tabel 5. Pengujian Regresi Sederhana

Variabel	R Square	t_{hitung}	Sig.
PAD (X_1)	0,415	4,272	0,000
DAU (X_2)	0,913	16,646	0,000

Pengujian Hipotesis Pertama

Berdasarkan tabel di atas nilai R Square diketahui bahwa nilai R Square PAD (X_1) sebesar 0,415 sehingga dapat di katakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (X_1) berpengaruh terhadap Belanja Daerah (Y) sebesar 41,5%. Pengujian berdasarkan nilai Sig. tabel di atas diketahui bahwa nilai Sig. PAD (X_1) sebesar 0,000 karena nilai sig. $<$ probabilitas sebesar 0,05 maka dapat di simpukan bahwa H_0 di tolak artinya Pendapatan Asli Daerah (X_1) berpengaruh terhadap Belanja Daerah (Y). Pengujian berdasarkan t_{hitung} dan t_{tabel} tabel di atas diketahui bahwa nilai t_{hitung} 4,272 $>$ t_{tabel} 2.05183 maka dapat di simpukan bahwa H_0 di tolak artinya Pendapatan Asli Daerah (X_1) berpengaruh terhadap Belanja Daerah (Y).

Pengujian Hipotesis Kedua

Berdasarkan tabel di atas nilai R Square diketahui bahwa nilai R Square DAU (X_2) sebesar 0,913 sehingga dapat dikatakan bahwa Dana Alokasi Umum (X_2) berpengaruh terhadap Belanja Daerah (Y) sebesar 91,3%. Pengujian berdasarkan nilai Sig. tabel di atas diketahui bahwa nilai Sig. DAU (X_2) sebesar 0,000 karena nilai sig. < probabilitas sebesar 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa H_0 di tolak artinya terdapat pengaruh Dana Alokasi Umum (X_2) terhadap Belanja Daerah (Y). Pengujian berdasarkan t_{hitung} dan t_{tabel} tabel di atas diketahui bahwa nilai t_{hitung} 16,646 > t_{tabel} 2.05183 maka dapat disimpulkan bahwa H_0 di tolak artinya terdapat pengaruh Dana Alokasi Umum (X_2) terhadap Belanja Daerah (Y).

Pengujian Regresi Berganda

Tabel 6. Pengujian Regresi Berganda

Variabel	Koefisien Regresi	Beta	t_{hitung}	Sig.
Konstanta	-64487,193			
PAD (X_1)	2,151	0,217	4,272	0,000
DAU (X_2)	1,657	0,846	16,646	0,000
f_{hitung}	246,498			0,000
R Square	0,948			

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan persamaan regresi data panel sebagai berikut: $BD = -64487,193 + 2,151PAD + 1,657DAU$. Berdasarkan persamaan di atas, diketahui nilai koefisien sebesar -64477,193, yang berarti jika nilai variabel PAD dan DAU memiliki nilai 0 maka belanja daerah sebesar Rp -644.87,193.

Pengujian Hipotesis Ketiga

Pengujian berdasarkan nilai Sig. tabel 4.8 di atas, diketahui bahwa nilai f Sig. sebesar 0,000 karena nilai sig. < probabilitas sebesar 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa H_0 di tolak artinya terdapat pengaruh Pendapatan Asli Daerah (X_1) dan Dana Alokasi Umum (X_2) secara simultan berpengaruh terhadap Belanja Daerah (Y). Pengujian berdasarkan t_{hitung} dan t_{tabel} tabel 4.8 di atas, diketahui bahwa nilai f_{hitung} 246,498 > f_{tabel} 3.34 maka dapat disimpulkan bahwa H_0 di tolak artinya terdapat pengaruh Pendapatan Asli Daerah (X_1) dan Dana Alokasi Umum (X_2) secara simultan berpengaruh terhadap Belanja Daerah (Y).

Pengujian Hipotesis Keempat

Pengujian hipotesis keempat, untuk menentukan apakah terjadi *flypaper effect* maka efek DAU terhadap BD dibandingkan dengan efek PAD terhadap BD syarat terjadinya *flypaper effect* adalah apabila nilai koefisien DAU terhadap BD lebih besar daripada PAD dan keduanya sama-sama signifikan. PAD tidak signifikan, maka dapat disimpulkan terjadi *flypaper effect*. Berdasarkan pada tabel 4.8 di peroleh nilai koefisien DAU sebesar 0,846 dan nilai koefisien PAD



sebesar 0,217 dan keduanya berpengaruh di lihat dari nilai sig. < dari 0,05 untuk DAU dan PAD. hal ini berarti telah terjadi *flypaper effect* pada belanja daerah karena sesuai dengan syarat pertama dimana pengaruh DAU terhadap belanja daerah lebih besar daripada PAD dan keduanya sama-sama signifikan dengan demikian hipotesis keempat di terima.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh dari selisih capaian pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU) terhadap belanja daerah pada kabupaten/kota di wilayah Keresidenan Madiun periode 2014-2018. Berdasarkan hasil dan analisis data maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah (BD).
2. Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah (BD).
3. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah (BD).
4. Terjadinya *flypaper effect* terhadap Belanja Daerah (BD) disebabkan karena pemerintah daerah lebih mengutamakan penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) di bandingkan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang lebih baik sehingga terkesan pendapatan daerah yang kurang mencukupi Belanja Daerah (BD).

Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan serta keterbatasan penelitian di atas, maka penelitian ini memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi penelitian selanjutnya sebaiknya menambah jumlah sampel penelitian agar hasil penelitian lebih luas.
2. Bagi penelitian selanjutnya sebaiknya menambah periode penelitian agar hasil penelitian lebih terlihat variasi antar tahun pengamatan.
3. Menambah variabel lain yang memiliki pengaruh terhadap perubahan anggaran belanja modal.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprizay, Y. S., & Darwanis, M. A. (2014). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Pengalokasian Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh*. Jurnal Akuntansi ISSN, 2302, 0164.
- Arwaty, D., & Hadiati, N. (2013, November). *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Pada Pemerintah Daerahkabupaten/Kota Di Propinsi Jawa Barat*. Seminar Nasional Teknologi Informasi & Komunikasi Terapan 2013 (Semantik 2013), Universitas Dian Nuswantoro.



- Fauriza, R., Salbiah, S., & Muda, I. (2018, October). *Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Pengalokasian Belanja Modal di Provinsi Sumatera Utara*. In *Talenta Conference Series: Local Wisdom, Social, and Arts (LWSA)* (Vol. 1, No. 1, pp. 178-184).
- Hafiluddin Nauval (2013). *Analisis Flypaper effect Pada Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Di Indonesia*. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Volume 11*, Nomor 1, Juni 2010, hlm.69-92.
- Herlina, E. (2013). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Belanja Daerah serta Dampaknya terhadap Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Berau*. *Journal of Innovation in Business and Economics*, 4(1), 25-44.
- Imam Ghozali. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21*. Semarang :Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Kartika, T. (2013). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Belanja Daerah Dan Kemungkinan Terjadinya Flypaper Effect Di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2005-2011*. *Jurnal Ilmu Ekonomi*.
- Octovido, I. (2014). *Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Batu (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu Tahun 2009-2013)*. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 15(1).
- Pramuka, B.A. (2010). *Flypaper effect Pada Pengeluaran Pemerintah Daerah Di Jawa*.
- Sugiyono. (2016). *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: penerbit Alfabeta.
- Susanti Eka Wahyuni dan Indrian Supheni (2017) “*Flypaper Effect Pada Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dan Dana Alokasi Umum (Dau) Terhadap Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Periode 2012-2016*” *Akuntansi Dewantara* Vol. 1 No. 2 Oktober 2017 hal 188-200.
- Suyanto. “*Flypaper effect Theory Dalam Implementasi Kebijakan Desentralisasi Fiskal*”. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 11(1), Juni 2010, hal. 69-92
- Syaukani, H. R., Gaffar, A., & Rasyid, M. R. (2002). *Otonomi daerah dalam negara kesatuan*. Yogyakarta: Kerjasama Pustaka Pelajar [dan] Pusat Pengkajian Etika Politik dan Pemerintahan.
- Tahar, A., & Zakhya, M. (2016). *Pengaruh pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap kemandirian daerah dan pertumbuhan ekonomi daerah*. *Journal of Accounting and Investment*, 12(1), 88-99.
- Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah**
- Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah**
- <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=5412> di akses tanggal 15 Mei 2019
- <https://www.bps.go.id/> di akses tanggal 15 Juni 2019
- <https://madiunkota.go.id/2018/11/19/apbd-2019-di-dok-proyeksi-pendapatan-rp-109-triliun/> di akses tanggal 15 Juni 2019